BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya pada Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Laporan

Menurut Iman Mulyana (2010:96) kualitas adalah:

> "Kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan"

Menurut Mahmudi (2016:11) Laporan Keuangan adalah :

> "Informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas."

Menurut Mahsun (2006:123) Laporan Keuangan adalah :

"Hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan, informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal."

Menurut Hariadi dkk (2010) laporan keuangan adalah :

"Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya."

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

2.1.2.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuanganya. Menurut Mahmudi (2016:11) laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi indikator sebagai berikut :

1. **Relevan** artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:
   a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*predictive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan dan kinerja dimasa datang.
   b. Laporan Keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan manfaat umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja dimasa datang (*feedback value*).
   c. Laporan Keuangan dipublikasikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

2. **Andal (*Reliability)*** artinya informasi yang disajikan dalamm laporan keuangan harus daapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan Keuangan yang andal memilik ciri sebagai berikut:
   a. Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
   b. Dapat diverifikasi (*veriability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenaranya melalui proses audit laporan keuangan.
   c. Netral dalam penyajianya (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan todak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. **Dapat dibandingkan *(comparability)***, artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. **Dapat dipahami (*understandability*),** artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna keuangan.

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

menurut Erlina Rasdianto (2013:6) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu :

> "sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)."

Menurut Mahmudi (2016:19) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah :

> "Kumpulan subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai la
> poran untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah."

Adapun definisi Sistem Akuntansi Keunagan Daerah (SAKD) menurut Deddi Nordiawan (2010:201) adalah :

> "proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan."

Dari Pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

2.1.1.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Deddi Nordiawan (2010) indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai berikut:

1. Pencatatan

2. Pengidentifikasian

3. Pelaporan

Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

1. Pencatatan
   a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
   b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Pengidentifikasian

a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Rudi M. Harahap (2013:19) dalam buku Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sertor Publik menerangkan sebagai berikut:

> "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/kegagalan misi organisai/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban".

Menurut Deddi Nordiawan (2010:169) menerangkan bahwa:

> "Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menguraikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan".

Menurut Rahardjo adisasmita (2011:103) menyatakan bahwa:

> "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan/kegagalan kinerja selama satu periode yang telah terjadi.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Rahardjo adisasmita (2011:103) menyatakan Indikator akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1) **Masukan *(Input),*** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya:
   a) Jumlah dana yang dibutuhkan.
   b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
   c) Jumlah infrastruktur yang ada.
   d) Jumlah waktu yang digunakan.
2) **Proses *(Process),*** Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya:
   a) Ketaatan pada peraturan perundangan.

b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

3) Hasil *(Outcomes),* segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya:

a) Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
b) Produktivitas para karyawan atau pegawai.

4) Manfaat *(Benefit),* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya:

a) Tingkat kepuasan masyarakat.
b) Tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penelitian ini menggunakan pendekatan melalui indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Rahardjo adisasmita (2011:103) dimana dari indikator ini akan dikembangkan menjadi kuesioner untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yang terdiri Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X) dan Kulitas Laporan Keuangan (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Z) sebagai variabel dependen.

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2004: 96) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Menur Abdul Halim, dkk (2010:120) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Implementasi sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal terhadap pengguna laporan keuangan (stakeholder).

Menurut Ni Made Rika Krisna Dewi, dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dan hasil penelitian Luh Kadek Sri Megawati, dkk (2015) menyatakan secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

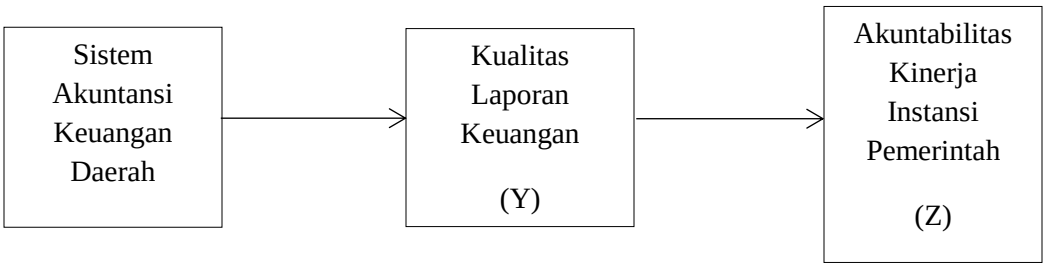
Menurut Mursyidi (2013:59) Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk

satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

Menurut Deddi Nordiawan (2010:125) laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas kinerja sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informaasi keuangan sektor publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Urip Santoso, dkk (2008), Darwanis, dkk (2013) dan Bambang Pamungkas (2012) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dari kerangka pemikiran, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan daftar penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

a. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 10 Skpd Berupa Dinas Di Kabupaten Jembrana)	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana.
2	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1	Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

	(Volume 2 No: 1 Tahun 2014)		
3	Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)	hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Nurhayati Soleha Vol. 13 No. 1 April 2014	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten	Hasil penelitian menunjukan bahwa system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemrintah daearah.
5	Tutun Hermawanto Botutihe	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh terhadap

		Pemerintah Kota Gorontalo	kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Gorontalo.

b. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Z)

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Urip Santoso, Yohanes Joni Pambelum (ISSN:0216-1249) Vol 4, No. 1 : hal. 14-33,	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabiltas Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud	Secara Teoritis Penerapan Akuntansii Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah
2	Darwanis, Sephi Chairunisa Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hlm. 150-174	Akuntabilitas Intansi Pemerintah	Hasil Penelitian Menuunjukan Bahwa Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki kolerasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Anita Ugun (2014)	Pengaruh Sistem akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hal ini menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4	Bambang Pamungkas Volume 12 No, 1, April 2012	Pengaruh Penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hal ini menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemrintah
5	Dodi Fs Lumentut, Sahmin Naholo, Amir Lukum (2014)	Pengaruh kualitas Pelaporan Keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah kota gorontalo (studi kasus pada isnpektoran kota gorontalo)	Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah gorontalo

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H_2 : Kualitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah